



**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN NGADIROJO
(2 0 2 6)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO**
Jalan Raya Ngadirojo Nomor 50 Telepon (0357) 441149
N G A D I R O J O

PENETAPAN KINERJA

KANTOR CAMAT NGADIROJO

KABUPATEN PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Kantor Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan, merupakan ikhtisar Rancangan Awal Rencana Kerja yang akan dicapai pada tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Rancangan Awal Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2026.

Ngadirojo, 01 Agustus 2025

CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos. M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19720520 199203 1 020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan tindak lanjut surat edaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 188/3259/408.53/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 kabupaten Pacitan .

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Ngadirojo ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Ngadirojo . Apabila dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ngadirojo, 01 Agustus 2025

CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19720520 199203 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN		
I.1 LATAR BELAKANG	5
I.2 LANDASAN HUKUM	6
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD	19
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD	28
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	29
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	42
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD	43
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 126 ayat (1) dan (2) tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perwujudan akuntabilitas pemerintah tersebut merupakan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, cepat dan legitimate dapat terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sehingga dapat tercipta sebuah *Good Governance*.

Adapun wujud akuntabilitas pemerintahan dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah terdapat suatu tahapan yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah yaitu perencanaan kinerja yang merupakan penyusunan rencana kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang bersifat tahunan. Pada kinerja rencana tahunan menetapkan pula rencana pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan dan penyusunan kebijakan anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Ranwal Renja Perangkat daerah Tahun 2026 Kecamatan Ngadirojo adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 1. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024, tentang Pemerintah Daerah ; (Lembaran Negara RI tahun 204 Nomor : 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja ;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara RI tahun 2026 Nomor 114);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2027 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2027 Nomor 73, Tambahan Lembarab Negara RI Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2028 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lembaran Neraga RI Tahun 2028 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 22029 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2029 Nomor 42, Tambahan lembaran negara RI Nomor 6322;
 12. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026;

13. Permendangri Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 tahun 2027 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat aerah provisni dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangaunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah entang Rancanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2028, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Sireta Negara RI Tahun 2028 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2029, tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;
18. Peraturan Meenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2029, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2029, tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2029-2026 sebagaimanq di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pacitan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2026 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2021;

27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022.
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Nomor : 188/3002/408.53/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat daerah tahun 2026 Kabupaten Pacitan

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja) Kecamatan Ngadirojo Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Kecamatan Ngadirojo ini merupakan pedoman evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ngadirojo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan sesuai Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengelolaan Operasional Administrasi Perkantoran;
2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK, KTP dan surat legalisasi lainnya;
3. Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah , Pemuda dan Olah Raga sesuai jumlah pagelaran yang difasilitasi;
4. Pemenuhan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK;
5. Terlaksananya Rapat Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa ke 18 Desa;
6. Terlaksananya Pelayanan bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Terpenuhinya Pendampingan Penyusunan APBDes , APBDes Perubahan dan Penarikan PBB ke 18 Desa;
8. Terlaksananya Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan terpenuhinya Pembinaan LINMAS ke 18 Desa.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Ngadirojo Tahun 2026 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Ngadirojo adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengorinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - c. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenyraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
4. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum :
 - a. Sinegitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

- c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di willyah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- 7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- 8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 9. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Ngadirojo tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Ngadirojo, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2025 – 2029. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngadirojo antaran lain :

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KECAMATAN NGADIROJO
PERIODE : JULI

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian		
					Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
701	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	72.85	2.654.783.919,00	72.00	1.466.089.238,00	98.83%	55.22%	
701	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23.00	29.163.423,00	12.00	653.775,00	52.17%	2.24%	
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Laporan Keuangan dan Capaian kinerja perangkat daerah	19.00	27.994.827,00	11.00	473.775,00	57.89%	1.69%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	1.168.596,00	2.00	180.000,00	50%	15.4%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										53,95	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Rendah	
Rendah	Sangat Rendah										
701	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59.00	1.946.611.926,00	22.00	1.175.709.867,00	37.29%	60.4%
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	1.922.705.822,00	0.00	1.173.789.867,00	0%	61.05%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	24	21.239.920,00	8.00	1.920.000,00	33.33%	9.04%
			0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	2.666.184,00	5.00	0,00	41.67%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										25,00	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	
Rendah	Sangat Rendah										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100.00	160.337.000,00	0.00	137.606.700,00	0%	85.82%
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	160.337.000,00	1.00	137.606.700,00	50%	85.82%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										50,00	85,82
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Tinggi
701	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100.00	40.036.900,00	10.00	4.056.400,00	10%	10.13%
701	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	16.549.400,00	1.00	4.056.400,00	100%	24.51%
			0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	11.809.700,00	1.00	0,00	100%	0%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	11.677.800,00	1.00	0,00	100%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										100,00	8,17
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
701	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100.00	118.681.500,00	60.00	68.100.000,00	60%	57.38%
701	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	118.681.500,00	1.00	68.100.000,00	50%	57.38%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										50,00	57,38
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Rendah
701	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan	100.00	193.181.670,00	42.00	78.775.996,00	42%	40.78%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintahan Daerah	Operasional PD						
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	21.596.070,00	3.00	9.875.996,00	25%	45.73%
			0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	7.700.000,00	3.00	0,00	50%	0%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	163.885.600,00	3.00	68.900.000,00	25%	42.04%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										33,33	29,26
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100.00	166.771.500,00	41.00	1.186.500,00	41%	0.71%
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	133.178.700,00	0.00	1.186.500,00	0%	0.89%
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	33.592.800,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										0,00	0,45
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	96.00	31.317.760,00	0.00	11.390.250,00	0%	36.37%
701	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal	12.00	15.515.752,00	0.00	7.190.000,00	0%	46.34%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	15.515.752,00	0.00	7.190.000,00	0%	46.34%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah
701	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12.00	15.802.008,00	2.00	4.200.250,00	16.67%	26.58%
701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	15.802.008,00	0.00	4.200.250,00	0%	26.58%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah
701	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100.00	249.398.496,00	18.00	167.288.572,00	18%	67.08%
701	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	18.00	249.398.496,00	18.00	167.288.572,00	100%	67.08%
701	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.00	35.369.884,00	0.00	15.325.472,00	0%	43.33%
			0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	214.028.612,00	20.00	151.963.100,00	166.67%	71%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											83,34
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Tinggi
Rendah											

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian						
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	100,00					
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Tinggi					
701	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100.00	203.517.152,00	0.00	74.844.000,00	0%	36.78%					
701	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.00	203.517.152,00	2.00	74.844.000,00	16.67%	36.78%					
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	203.517.152,00	2.00	74.844.000,00	11.11%	36.78%					
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	11,11					
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah					
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	16,67					
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah					
701	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100.00	14.920.300,00	0.00	3.231.169,00	0%	21.66%					
701	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase penyelenggaraan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100.00	14.920.300,00	18.00	3.231.169,00	18%	21.66%					
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12	14.920.300,00	2.00	3.231.169,00	16.67%	21.66%					
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	16,67					
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah					
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah					

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian		
				Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	18,00	21,66
								Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100.00	167.428.576,00	0.00	58.153.932,00	0%	34.73%
701	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Sudah menyusun administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	100.00	167.428.576,00	18.00	58.153.932,00	18%	34.73%
701	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	54	35.272.852,00	18.00	8.694.000,00	33.33%	24.65%
			0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	36.031.968,00	2.00	3.042.000,00	16.67%	8.44%
			0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	96.123.756,00	3.00	46.417.932,00	25%	48.29%
								Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	25,00	27,13
								Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	18,00	34,73
								Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
								Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)	19,47	41,97
								Predikat kinerja seluruh program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
					Total	3.321.366.203,00		1.780.997.161,00		
					Percentase Realisasi Anggaran			53.62%		
					Predikat		Rendah			

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021. Pada tahun anggaran 2025, Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 3.321.366.203,00 dari jumlah anggaran yang disediakan tersebut, sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 telah terealisasi sebesar Rp. atau 53.62% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi		Sisa Dana
			Jumlah	%	
02.01	BELANJA OPERASI	Rp3.145.660.921,00	Rp1.601.802.084,00	50,92%	Rp 1.543.858.837,00
02.01.01	1. Belanja Pegawai	Rp1.922.705.822,00	Rp1.054.693.548,00	54,85%	Rp 868.012.274,00
02.01.02	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp1.222.955.099,00	Rp547.108.536,00	44,74%	Rp 675.846.563,00
02.02	BELANJA MODAL	Rp 26.741.300,00	Rp -	0,00%	Rp 26.741.300,00
02.02.01	Tanah
02.02.02	Peralatan dan Mesin	Rp 26.741.300,00	Rp -	0,00%	Rp 26.741.300,00
02.02.03	Gedung dan Bangunan
02.02.05	Aset Tetap lainnya
	JUMLAH BELANJA	Rp 3.172.402.221,00	Rp 1.601.802.084,00	50,49%	Rp 1.570.600.137,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kreteria) dan SPM ,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan .

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari:
 1. Desa Sidomulyo
 2. Desa Hadiwarno
 3. Desa Hadiluwih
 4. Desa Tanjungpuro
 5. Desa Pagerejo
 6. Desa Wiyoro
 7. Desa Ngadirojo
 8. Desa Bogoharjo
 9. Desa Cokrokembang
 10. Desa Bodag
 11. Desa Tanjunglor
 12. Desa Nogosari
 13. Desa Cangkring
 14. Desa Wonoadi Kulon
 15. Desa Wonoadi Wetan
 16. Desa Wonokarto
 17. Desa Wonosobo
 18. Desa Wonoasri

3. Kecamatan mempunyai tugas Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan
4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai peraturan perundang undangan ;
 - b) Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Pengoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i) pelangsanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
5. Selain melaksanakan tugas , Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
6. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

SEKRETARIAT

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;

- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- c. Melakukan pengelolaan data;
- d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
- e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akutansi dan pelaporan keuangan;
- g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik Daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik Tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi fernal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan ihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi fernal;
- c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaragaan kegiatan pemerintahan;
- e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertahanan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah Kecamatan dan kerja sama antar kecamatan
- j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa;
- k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa fan peraturan kepala desa;
- l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;

- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- o. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan permusyawaratan desa;
- q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya
- t. Melaporkan pelaksanaan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

SEKSI SOSIAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Uraian Tugas Seksi Sosial sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundungan-Undangan;
- h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. Mengoordinir pelaksanaan pembangunan Kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- g. Mengoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan / atau Kelurahan
- o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan;
- p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/ atau Kelurahan;
- q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa dan/ atau Kelurahan ;
- r. Melaksanakan evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan ;
- s. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
- u. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- v. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyawarat;
- w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam
- y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- å. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Perundang-Undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Kantor Kecamatan Ngadirojo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik di bidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat / melayani masyarakat Kantor Kecamatan Ngadirojo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Mengingat jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Ngadirojo hanya bersifat legalisasi, maka penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) hanya menggunakan kuesioner (pendapat responden tentang Pelayanan Publik) yang datang ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini terdiri atas 9 (sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

Nilai Rata-rata per Unsur Pelayanan Tahun 2025

Unsur ke	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	PERSYARATAN	3,81
2	PROSEDUR	3,81
3	WAKTU	3,81
4	BIAYA/TARIP	3,97
5	PRODUK LAYANAN	3,82
6	KOMPENTENSI PELAKSANA	3,86
7	PERILAKU PELAKSANA	3,82
8	SARANA DAN PRASARANA	3,95
9	PENANGANAN PENGADUAN	3,56
	NILAI KEPUASAN MASYARAKAT	88,45

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Ngadirojo secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik.

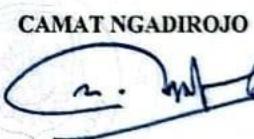
1. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Ngadirojo setelah dikonversikan (88,45) Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Ngadirojo adalah SANGAT BAIK.
2. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NGADIROJO

NO	Sasaran	Indikator	SPM/Standar Naional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun			86,94	88,45	89,96	91,47	86,94	88,45	100%	100%	
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Ngadirojo, 01 Agustus 2025

CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19720520 199203 1 020

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), serta lingkungan eksternal dimana peluang (opportunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Ngadirojo. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Ngadirojo sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa hambatan, antara lain : (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif :

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirojo ditentukan, isu- isu strategis yaitu sebagai berikut :

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan; (2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company / Coorperate Social Resposipiloty (CSR) , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3). Meningkatnya kualitas pelayanan secara prima adalah faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang akan mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pelayanan di daerah Kecamatan Ngadirojo. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat. (4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. (5). Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Program : DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA; |
| Kegiatan : | <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;• Administrasi keuangan perangkat daerah;• Administrasi kepegawaian perangkat daerah;• Administrasi umum perangkat daerah; |

- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
2. Program : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan :
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
3. Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- Kegiatan :
- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
4. Program : KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan :
- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum
5. Program : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan :
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
6. Program : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
- Kegiatan :
- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Pacitan Kecamatan Ngadirojo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec.Ngadirojo	Nilai Sakip PD		2.726.766.611,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec.Ngadirojo	Nilai Sakip PD		2.726.766.611,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Dok	20.723.423,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kec.Ngadirojo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	12 Dok	20.723.423,00	

						Perangkat Daerah		Kinerja PD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Layanan Adminitrasi Keuangan PD	100%	2.117.708.699,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Layanan Adminitrasi Keuangan PD	100%	2.117.708.699, 00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah pegawai yang dikelola PD	20 Pegawai	30.994.200,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah pegawai yang dikelola PD	100%	30.994.200,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum PD	100%	50.839.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum PD	100%	50.839.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan	100%	138.681.000,00	Pengadaan Barang	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan	100%	138.681.000,0 0	

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Layanan Barang Milik Daerah			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Layanan Barang Milik Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	210.273.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	210.273.400,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	118.861.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	118.861.400,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	100%	26.148.997,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	100%	26.148.997,00	

			dilaksanakan			DAN PELAYAN AN PUBLIK		Publik yang dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Ngadirojo	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarak an	100%	26.148.997,00	Penyelenga raan Urusan Pemerintaha n yang tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Ngadirojo	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarak an	100%	26.148.997,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggara n Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	218.549.366,00	PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggar an Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	218.549.366,0 0	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah Desa yang difasilitasi	100%	218.549.366,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah Desa yang difasilitasi	100%	218.549.366,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	158.153.178,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	158.153.178,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Ngadirojo	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	158.153.178,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Ngadirojo	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	158.153.178,00	
	PROGRAM PENYELENGGARA	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggara	100%	10.825.440,00	PROGRAM PENYELE	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggara	100%	10.825.440,00	

	AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		n Pemerintahan Umum yang dilaksanakan			NGGARAA N URUSAN PEMERINT AHAN UMUM		an Pemerintahan Umum yang dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	10.825.440,00	Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi dalam penyelenggar aan pemerintahan umum	100%	10.825.440,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ngadirojo	Presentase desa yang termonitoring	100%	117.118.766,00	PROGRAM PEMBINA AN DAN PENGAWA SAN PEMERINT AHAN DESA	Kec.Ngadirojo	Presentase desa yang termonitoring	100%	117.118.766,0 0	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa yang termonitoring	100%	117.118.766,00	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa yang termonitoring	100%	117.118.766,0 0	

					dan Pengawasan Pemerintaha n Desa					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan ini berasal dari usulan desa melalui musrenbang desa yang belum dapat diusulkan melalui Dana Desa, ADD dan Dana BK. Usulan tersebut merupakan usulan RKP desa pada tahun 2026.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN KECAMATAN NGADIROJO

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Kec.Ngadirojo	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Ngadirojo	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	
	Administrasi Keuangan	Kec.Ngadirojo	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	100 %	
	Administrasi Kepegawaian	Kec.Ngadirojo	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundanagan	100 %	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Ngadirojo	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ngadirojo	Prosentase ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ngadirojo	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kec.Ngadirojo	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100%	

	DAN PELAYANAN PUBLIK		Pelayanan Publik yang dilaksanakan Pelayanan Publik yang dilaksanakan		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Ngadirojo	Jumlah layanan yang terselenggara Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	17 jenis	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Ngadirojo	Prosentase cakupan desa dan kelurahan yang difasilitasi	18 Desa	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa yang difasilitasi	18 Desa	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Ngadirojo	Prosentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Ngadirojo	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umu	12 Laporan	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Ngadirojo	Prosentase desa yang terpenuhi	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Kec.Ngadirojo	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Urusan	18 Desa	

	Daerah		Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ngadirojo	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Ngadirojo	Jumlah desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Ngadirojo guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut : - Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; - Pendidikan; - Kesehatan; - Penanggulangan Kemiskinan; - Ketahanan Pangan; - Infrastruktur; - Iklim investasi dan Iklim usaha; - Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; - Kebudayaan dan Pariwisata; - Kreativitas dan inovasi; - Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban; - Perekonomian; - Kesejahteraan rakyat. Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Ngadirojo sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Ngadirojo memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut di atas, maka Kecamatan Ngadirojo di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Ngadirojo yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang di laksanakan di

Kecamatan Ngadirojo telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo adalah terselenggaranya tata kelola di kecamatan Ngadirojo yang baik. Dengan sasaran meningkatnya tata kelola Kecamatan Ngadirojo yang transparan dan akuntabel.

Dengan tujuan dan sasaran Operasional Perangkat Daerah tersebut perangkat daerah memiliki indikator kinerja :

1. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah dengan program prioritas pembangunan program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah dengan program prioritas pembangunan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Tingkat disiplin aparatur dengan program prioritas pembangunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.3 Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo mempunyai 6 program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yaitu :

1	2	3	4
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPERANGKAT DAERAH
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

- a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya terkait dengan :
 - 1. Pencapaian Visi misi kepala daerah
 - 2. Pencapaian SDGs
 - 3. Pengentasan kemiskinan
 - 4. Pencapaian NSPK dan SPM
 - 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - 6. Pengembangan daerah terisolir
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Jumlah program dan jumlah kegiatan Kecamatan Ngadirojo mempunyai 6 program, 12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebut menyebar di semua Seksi . Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Total Pagu anggaran tahun 2026 Rp 3.257.562.358 ,00 sumber pendanaan dari DAU.
- c. Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal maka dilaksanakan Renja perubahan.
- d. RKPD baik jenis program / kegiatan , pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dan Kegiatan

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Ngadirojo selama 5 tahun dari tahun (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun ke depan . Rencana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

4.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya

4.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Ngadirojo adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Dan salah satu poin pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam perubahan Renstra Kecamatan Ngadirojo tahun 2025-2029

4.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngadirojo bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan, UPT TK/SD, UPT kegunaan bisa mendapatkan dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari instansi induknya

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Ngadirojo dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Ranwal Renja Tahun 2026 Kecamatan Ngadirojo memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2026 di Kecamatan Ngadirojo dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Ngadirojo ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerjasama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Ranwal Renja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIONO, S.Sos.M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19720520 199203 1 020

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD) KECAMATAN NGADIROJO KAB. PACITAN TAHUN
2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		KECAMATAN NGADIROJO							3.257.562.358,00								0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.257.562.358,00									0,00	
	7.01	KECAMATAN						3.257.562.358,00									0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.726.766.611,00						-			0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	20.723.423,00			-	-	-	12 Dokumen		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen				19 Dokumen	18.554.827,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	19 Dokumen		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan				4 Laporan	2.168.596,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.117.708.699,00			-	-	-	100 %		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan				20 Orang/bulan	2.085.802.595,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	20 Orang/bulan		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	47 Laporan				47 Laporan	26.239.920,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	47 Laporan		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen				12 Dokumen	5.666.184,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	-	24 Pegawai			-	30.994.200,00			-	-	-	24 Pegawai		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket				2 Paket	30.994.200,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket		0,00	KECAMATAN NGADIROJO	

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	89.524.489,00			-	-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	28.936.989,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	21.809.700,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	38.777.800,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	138.681.000,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			9 Unit	138.681.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	210.273.400,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	27.355.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	42.400.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	140.518.400,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	118.861.400,00			-	-	-	100 %	0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit			12 Unit	74.266.700,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Unit	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	44.594.700,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyeleenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %			100 %	26.148.997,00						100 %	0,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan yang terselenggara Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	17 Jenis			17 Jenis 12 Bulan	26.148.997,00			-	-	-	17 Jenis	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	26.148.997,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	218.549.366,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	18 Desa			-	218.549.366,00			-	-	-	18 Desa	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	38 Dokumen			38 Dokumen	30.293.484,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	38 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	188.255.882,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	158.153.178,00						-	0,00	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 Laporan			-	158.153.178,00			-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan		62.363.748,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan		95.789.430,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-		10.825.440,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	18 Desa		-		10.825.440,00			-	-	-	18 Desa	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan			12 Laporan		5.424.500,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			12 Dokumen		5.400.940,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-		117.118.766,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	18 Desa		-		117.118.766,00			-	-	-	18 Desa	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	30.272.852,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	19.722.158,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	12 Laporan			12 Laporan	49.123.756,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGADIROJO
			J U M L A H					3.257.562.358,00							0,00	

